**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Buta aksara adalah salah satu masalah nasional sampai saat ini belum tuntas sepenuhnya. Buta aksara merupakan masalah sosial yang sudah lama melanda indonesia, berbagai upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas buta aksara, tetapi buta aksara masih saja banyak. Buta aksara dianggap bukanlah isu baru bagi negara ini namun sudah dianggap sebagai masalah sosial yang membutuhkan penanganan sosial yang serius. Kenapa dikatakan demikian? Karena jika hanya ditangani dengan biasa-biasa saja maka Indonesia tidak akan tumbuh namun hanya berkembang, sehingga ketinggalan jauh dibanding dengan negara-negara yang lain.

Seperti dinyatakan Soekanto (2003:23) bahwa masalah sosial adalah “suatu ketidaksesuaian yang terjadi antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, dimana ketidaksesuaian tersebut dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial masyarakat”. Salah satu masalah yang membahayakan adalah masalah buta aksara, karena dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan kehidupan kelompok sosial masyarakat.

Usaha penuntasan buta aksara di Indonesia dilakukan secara terus menerus untuk mencapai tujuan dari pemberantasan itu sendiri yaitu berkurangnya angka buta aksara di Indonesia. Semua itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena sampai hari ini angka buta aksara di Indonesia terus saja meningkat, hal itu terjadi karena banyak kendala yang dihadapi, misalnya mereka yang buta aksara itu tidak mau belajar membaca, menulis, berhitung serta berkomunikasi.

Angka buta aksara di Indonesia, menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2015, masih tinggi, yakni 4,8 persen dari jumlah penduduk. Itu setara dengan 8,5 juta jiwa. Perlu penanganan khusus karena selain jumlahnya yang banyak, juga 60 persen dari 8,5 juta jiwa itu adalah kaum perempuan. Saat ini ada 10 provinsi dengan tingkat buta aksara tinggi hingga di atas 10 persen. Provinsi itu antara lain Papua, NTT, NTB dan Jabar serta Sulawesi Selatan. Untuk di Sulawesi Selatan ada beberapa Kabupaten yang tinggi angka buta aksaranya, diantaranya Kabupaten Bone dan Kabupaten Jeneponto. *(Sumber: Jurnal Makassar, Tahun 2015)*

Melek huruf merupakan dasar pengetahuan bagi manusia. Dengan membaca manusia dapat meningkatkan kualitas dirinya, yang berujung pada tingginya intelektualitas seseorang. Terlebih saat ini manusia telah memasuki era informasi. Di mana fenomena globalisasi yang terjadi saat ini mengalami akselerasi yang begitu cepat, sebagai dampak dari penerapan Hi-tech society (masyarakat berteknologi tinggi), yang menyebabkan manusia tergiring pada pola interaksi yang sangat cepat.

Kondisi yang demikian menuntut terciptanya individu-individu yang tidak hanya mampu beradaptasi, akan tetapi juga dapat berperan penting di dalamnya. Untuk itu, kita harus sadar bahwa pemberantasan buta huruf merupakan tanggung jawab bersama. Dalam hal ini pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, dan masyarakat harus mempunyai kemauan untuk keluar dari lingkaran buta huruf yang menyengsarakan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIV tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial pasal 34 ayat (2) dan (3) secara tegas dinyatakan bahwa:

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sesuai dengan makna pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas bahwa hak dan kewajiban Negara terhadap warga Negara seperti pendidikan, kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dalam hal ini semua dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Karena semakin kompleksnya masalah yang meliputi pemenuhan hal tersebut, fungsi pemerintah belum mencapai tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, peranan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi sosial lainnya mutlak diperlukan untuk membantu mengatasai hal tersebut.

Penanganan penduduk buta aksara dapat dilakukan melalui jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah, yang disesuaikan dengan kelompok usianya. Kemampuan keaksaraan penduduk buta aksara kelompok usia sekolah diutamakan melalui pendidikan persekolahan dan pendidikan kesetaraan. Sementara itu, untuk penduduk buta aksara dewasa produktif dilakukan melalui pendidikan keaksaraan fungsional.

Berdasarkan penelitian awal yang diperoleh dari Desa Kayuloe Barat yang menjadi lokasi penelitian penulis diperoleh informasi bahwa masyarakat yang buta aksara berjumlah sebanyak 70, orang yang terdiri dari 45 Perempuan dan 25 laki-laki, pekerjaan yang dilakoni bagi perempuan sebagian besar bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan laki-laki bekerja sebagai petani, dan rata-rata penduduk tersebut berusia diantara 25-44 tahun dimana diketahui bahwa usia tersebut merupakan usia produktif. *(Sumber: Desa Kayuloe Barat Tahun 2015)*.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat buta aksara adalah masyarakat yang berusia 25-44 tahun, usia tersebut adalah usia produktif, dimana dapat belajar dan bekerja membangun kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara umum dan bagi diri mereka sendiri secara khusus, karena mereka dianggap sebagai generasi muda yang masih dapat diberdayakan secara maksimal. Namun, dengan fakta-fakta yang ada sebagaimana uraian di atas harusnya masalah ini menjadi perhatian pemerintah setempat secara khusus sehingga angka penduduk buta aksara pada usia tersebut setidaknya bisa berkurang.

Berdasarkan data yang sudah ada, diperoleh informasi bahwa dari masalah sosial buta aksara ini telah diupayakan berbagai program pendampingan seperti kejar paket A, keaksaraan fungsional, dan masih banyak lagi program-program pemerintah yang siap untuk memberantas angka buta aksara di Indonesia. Tapi berbagai program tersebut, harapan bahwa angka buta aksara akan berkurang belum juga tuntas, masih ada saja daerah-daerah yang tingkat buta aksaranya masih tinggi sehingga masih memerlukan penanganan lebih lanjut seperti salah satu desa yang ada di Kabupaten Jeneponto yaitu Desa Kayuloe Barat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitan terhadap hal tersebut, yaitu apa saja yang menyebabkan terjadinya buta aksara warga masyarakat di Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto

1. **Fokus Masalah**

Berdasarkan judul dan uraian di atas maka penulis menetapkan fokus masalah yakni faktor yang menjadi penyebab buta aksara warga masyarakat di Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto?

1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab buta aksara warga masyarakat di Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto?

1. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis, berikut penjabarannya:

1. Manfaat Teoretis
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada jurusan PLS FIP UNM menjadi bahan bacaan dan tambahan referensi bagi yang ingin mengetahui tentang faktor penyebab buta aksara warga masyarakat di Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto
3. Bagi peneliti, pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga khususnya dalam melaksanakan suatu aktivitas penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah
4. Manfaat Praktis
5. Bagi Pemerintah setempat dalam hal ini aparat Desa Kayuloe Barat yaitu sebagai bahan informasi, bahan masukan dalam upaya optimalisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kayuloe Barat dalam menanggulangi warga masyarakat buta aksara.
6. Bagi masyarakat, dapat mengetahui pentingnya pendidikan dalam pengembangan kepribadian guna peningkatan sumber daya masyarakat.